

## Kolaborasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Penyelundupan di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Republik Indonesia & Republik Demokratik Timor Leste)

Hesti Rokhaniyah<sup>1)</sup>, M. Ilham Nazaruddin Noor<sup>2)</sup>, Ali Musa Harahap<sup>3)</sup>, Bagas Sagita Wijaya<sup>4)</sup>,  
Novi Rizka Amalia<sup>5)</sup>

<sup>1),2),3),4),5)</sup> Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor  
Jl. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur  
Email Koresponden: [hesti.r@unida.gontor.ac.id](mailto:hesti.r@unida.gontor.ac.id)

### ABSTRACT

*This study analyzes the collaborative efforts between Indonesia and Timor-Leste to reduce smuggling along their border regions. This qualitative research employs a document study technique, involving the analysis of secondary data obtained from books, journals, websites, and reports and this study utilizes the concepts of Border Diplomacy and International Cooperation. In pursuit of this objective, both countries have implemented border diplomacy to define their national boundaries and foster economic cooperation and cross-border collaboration to strengthen diplomatic relations and promote economic development in the border regions between the two nations. International cooperation in the border region encompasses various sectors, including the economic, social, and cultural realms, aimed at addressing issues such as smuggling. The Border Liaison Committee (BLC), led by the Vice Governor of NTT, serves as Border Liaison Committee and is responsible for coordinating social, economic, and cultural activities to enhance well-being and security in the border areas. Additionally, security cooperation in the border region involves the Indonesian National Police (POLRI) and the Timor-Leste National Police (PNTL) with the goal of addressing illegal entry, smuggling, and cross-border criminal activities. Lastly, the development of Border Crossing Posts (Pos Lintas Batas Negara - PLBN), such as PLBN Mota'ain, PLBN Wini, and PLBN Motamasin, had a significant impact on security, border, the economy, and surveillance between two countries.*

**Keywords:** Indonesia, Timor-Leste, Cooperation, Smuggling

### ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menganalisa upaya bersama antara Indonesia dengan Timor Leste dalam mengurangi penyelundupan di daerah perbatasan. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik studi dokumen, yang melibatkan analisis data sekunder dari situs web, buku, jurnal, dan laporan. Reduksi data, data display, dan interpretasi data digunakan untuk menganalisa data. Konsep Diplomasi Perbatasan dan Kerjasama Internasional digunakan dalam penelitian ini. Dalam rangka mencapai tujuan ini, kedua negara telah mengimplementasikan diplomasi perbatasan yang mengatur batas negara serta mengembangkan kerjasama ekonomi dan kerjasama lintas batas untuk memperkuat hubungan diplomatik dan pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan antara kedua negara. Sedangkan Kerjasama internasional di wilayah perbatasan melibatkan sektor ekonomi, sosial, dan budaya untuk mengatasi permasalahan termasuk penyelundupan. Perantara Perbatasan dipimpin oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai ketua BLC (Border Liaison Committee) yang bertugas melakukan koordinasi aktivitas sosial, ekonomi, dan demi peningkatan keamanan di perbatasan. Selain itu, kerjasama keamanan di wilayah perbatasan melibatkan Polri dan PNTL dengan tujuan mengatasi illegal entry, penyelundupan, dan tindakan kriminal lintas batas. Dalam hal keimigrasian, kedua negara menerapkan Pas Lintas Batas (PLB) untuk memudahkan perlintasan antar negara dan mengurangi aktivitas ilegal di perbatasan. Terakhir, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) antara lain Mota'ain, Wini, dan Motamasin telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian, keamanan, dan pengawasan perbatasan antara kedua negara.

**Kata kunci:** Indonesia, Timor Leste, Kerjasama, Penyelundupan

## 1. Pendahuluan

Hubungan Internasional adalah bidang yang dinamis, mengikuti perkembangan zaman, dan berkembang dari pembahasan awal tentang high politics hingga mencakup low politics seperti isu ekonomi, sosial, dan budaya. Isu politik, ekonomi, dan keamanan tetap menjadi fokus utama dalam dinamika hubungan internasional. Salah satu aspek penting dalam menjaga identitas dan kedaulatan negara adalah perbatasan, yang mencakup perbatasan darat dan laut. Penetapan perbatasan negara dapat didasarkan pada ketentuan tertulis seperti peta dan perjanjian batas wilayah, serta ketentuan tidak tertulis seperti pemukiman penduduk, perbedaan budaya, suku bangsa, dan bahasa di kawasan perbatasan. Semua ini menjadi faktor krusial dalam menjaga kedaulatan dan identitas suatu negara (Mansyah, 2017).

Indonesia memiliki perbatasan darat dan laut dengan Timor Leste, Papua Nugini, Malaysia, Australia, Singapura, Thailand, Palau, Filipina, dan India. Perbatasan ini mencerminkan kedaulatan Indonesia dan sangat penting dalam menjaga keamanan, integritas wilayah, serta pengelolaan sumber daya alam di dalamnya (Hidayat, 2015). Namun, pengelolaan wilayah perbatasan yang luas dengan distribusi penduduk yang tidak merata menjadi tantangan dalam pembangunan, pengawasan, dan pengendalian wilayah tersebut. Diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif untuk mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan agar mendapatkan perhatian yang layak. Kurangnya perhatian dalam pengelolaan perbatasan dapat menurunkan rasa nasionalisme masyarakat yang merasa kebutuhan mereka, terutama dalam hal keamanan, ekonomi, dan infrastruktur, tidak terpenuhi (Ramin, 2016). Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah perbatasan yang belum terselesaikan, terutama di perbatasan darat, yang bisa berpotensi menimbulkan pelanggaran perbatasan dan ketegangan antara negara tetangga. Ketegangan semacam itu dapat berujung pada konflik perbatasan jika tidak ditangani dengan cepat dan efektif (Permatasari, 2022).

Timor Timur, awalnya merupakan bekas jajahan Portugal, diakuisisi oleh Indonesia sebagai provinsi ke-27 setelah 450 tahun penjajahan. Proses pemisahan dimulai pada tahun 1999 melalui referendum di bawah pengawasan Persatuan Bangsa-Bangsa (Mulyawan, 2022). Sejarah perbatasan Indonesia-Timor Leste melibatkan pembagian wilayah oleh Belanda dan Portugal pada awal abad ke-20, yang ditetapkan dalam Traktat Den Haag 1904. Konflik perdagangan antara kedua negara berlanjut, dan perbatasan tidak sempurna hingga diselesaikan dalam Permanent Court of Arbitration (PCA) pada tahun 1914. Selama kekuasaan Portugis di Timor Timur, masyarakat merasa dieksploitasi, dan dekolonisasi Portugis memungkinkan Timor Timur untuk mencapai kemerdekaannya melalui referendum (Kemhan\_RI, 2015).

Masalah perbatasan negara mempunyai akar yang dalam sejak warisan zaman kolonial, yang mencakup perubahan tanda batas geografis, praktik jual beli tanah berdasarkan adat istiadat, dan perpindahan penduduk.

Permasalahan tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu "unsurveyed" (wilayah yang belum dapat disurvei karena penolakan warga setempat) dan "unresolved" (masalah wilayah perbatasan yang belum terselesaikan) (Mangku, 2018). Penyelesaiannya memerlukan tindakan dari pemerintah pusat dan lokal. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah "soft power" untuk menciptakan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengimplementasikan pendekatan ini. Di daerah perbatasan, kasus illegal entry dan penyelundupan barang, khususnya bahan bakar minyak (BBM), seringkali menjadi masalah serius (Nashiruddin, 2014). Wilayah perbatasan, seperti Motaain, rawan terhadap penyelundupan BBM, yang disebabkan oleh perbedaan harga komoditas dan tingginya permintaan konsumen dari Timor Leste akan BBM. Hal ini mengakibatkan masyarakat di wilayah perbatasan cenderung melakukan penyelundupan BBM ke Timor Leste, yang berpotensi merenggangkan hubungan bilateral antara kedua negara (Nino, 2018).

Kasus percobaan penyelundupan mobil mewah dari Timor Leste ke Indonesia yang berhasil digagalkan oleh Tentara Nasional Indonesia di perbatasan mencerminkan betapa pentingnya pengelolaan wilayah diperbatasan. Seringnya upaya penyelundupan yang berhasil terjadi disebabkan oleh keterbatasan personel yang berjaga di perbatasan yang sangat luas. Undang-Undang tersebut mengatur tentang batas wilayah yang merupakan garis batas yang memisahkan kedaulatan negara berdasarkan pada hukum internasional. Upaya peningkatan pengawasan dan keamanan perbatasan menjadi kunci untuk mengatasi masalah penyelundupan dan menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan ini (Payong, 2022)

Penelitian ini akan mengeksplorasi masalah yang berkepanjangan seputar perbatasan negara Indonesia dengan Timor Leste. Negara tetangga tersebut dipilih karena ketidakjelasan dalam penyelesaian masalah perbatasan yang berpotensi memunculkan aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang dan perdagangan manusia melalui jalur-jalur tidak resmi. Untuk mengatasi tantangan ini, penting adanya kerjasama antara kedua negara dalam kerangka hukum internasional. Kerjasama ini bisa terwujud melalui perjanjian bilateral, patroli bersama, dan implementasi prinsip kebijakan tetangga yang baik. Penelitian ini akan menginvestigasi lebih dalam efektivitas langkah-langkah kerjasama tersebut serta dampaknya pada aspek keamanan di perbatasan. Rumusan masalah utama dalam penelitian adalah bagaimana upaya Indonesia bersama Timor Leste dalam mengurangi tingkat penyelundupan di daerah perbatasan kedua negara

Dalam artikel ini, digunakan desain penelitian kualitatif untuk memahami peristiwa atau fenomena secara mendalam (Raco, 2018). Metode penelitian kualitatif ini melibatkan teknik pengumpulan data seperti penelitian berbasis studi pustaka melalui internet, observasi, dan studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan penjelasan yang

mendalam tentang upaya pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk mengatasi masalah penyelundupan di daerah perbatasan. Objek Teknik pengumpulan data didapatkan literatur dan media massa dan setelah itu data dianalisa dengan menggunakan model analisis interaktif yang telah dikembangkan oleh Huberman untuk memahami dan menginterpretasi data dengan baik.

## 2. Pembahasan

### a. Upaya Negara Indonesia dengan Timor Leste dalam Mengurangi Penyelundupan di Perbatasan

Penelitian ini membahas mengimplementasikan konsep Diplomasi Perbatasan menurut Alan K. Henrikson dan Teori Kerjasama Internasional menurut Keohane. Diplomasi perbatasan, menurut Henrikson (2000), melibatkan upaya negara demi menjaga hubungan yang harmonis dengan negara perbatasan, yang hanya tercapai dengan diplomasi lingkungan baik (*bon voisinage diplomacy*), yang melibatkan pengelolaan yang baik dan undang-undang yang tegas yang mengatur perbatasan negara, serta penghindaran konflik melalui pengelolaan bersama sebagai organ perifer negara. Sedangkan Teori kerjasama internasional menurut Axelrod & Keohane (2018) khususnya kerjasama *government to government*, memiliki relevansi penting dalam menjaga, mengelola, dan mempertahankan perbatasan negara yang berdaulat seperti Indonesia dengan Timor Leste.

#### 1) Diplomasi Perbatasan

Instrumen pertama dalam diplomasi perbatasan adalah pengelolaan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, yang melibatkan beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur (Salsabilla Denura & Puspita Sari, 2021). Garis perbatasan kedua negara memiliki panjang sekitar 268,8 km dan menjadi fokus hubungan bilateral mereka. Upaya pengelolaan keamanan perbatasan dilakukan melalui diplomasi perbatasan yang melibatkan pemerintah Indonesia dan Timor Leste, serta didasarkan pada dasar hukum dari masing-masing negara. Untuk itu kedua pemerintah melalui diplomasi perbatasan harus bekerjasama dalam mengelola daerah perbatasan. Perdana Menteri Timor Leste berkunjung ke Indonesiapada 12 Februari 2023 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023). Kedua pemimpin negara dalam pertemuan tersebut mendiskusikan upaya kerjasama bilateral khususnya di bidang ekonomi dan pengelolaan perbatasan. Presiden Joko Widodo menyambut dengan baik upaya konektivitas darat di daerah perbatasan kedua negara dengan adanya peluncuran trayek rute Kupang-Dili dengan trayek bus. Presiden Joko Widodo dan PM Timor Leste sepakat untuk memulai pembangunan Pos Lintas Batas Negara (Pradipta, 2023).

Indonesia dengan Timor Leste telah sepakat untuk bekerjasama di bidang ekonomi dan kawasan perbatasan. Kedua negara setuju untuk melakukan kerjasama perdagangan lintas batas di daerah perbatasan dengan difasilitasi oleh Asian Development Bank pada tahun 2019 (Jr, 2023) . Hal ini dilakukan untuk

menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di kawasan perbatasan. Asian Development Bank setuju untuk memberikan bantuan sebesar USD 950.000. Selain itu kerjasama ini dilakukan Timor Leste untuk mempersiapkan diri untuk masuk ke ASEAN dan juga diversifikasi dari ketergantungan minyak. Dampak yang diharapkan dari kerjasama ini adalah peningkatan perdagangan dan kerjasama pariwisata antara Indonesia dan Timor Leste (Davis, 2019).

Perbatasan suatu negara adalah wilayah perifer yang memerlukan kerjasama antara negara-negara yang berbatasan untuk mengatasi isu-isu dan permasalahan yang muncul di wilayah tersebut (Rachmawati & Dewi, 2020). Kedaulatan negara tercermin dalam perbatasan, yang penting untuk menjaga keamanan, integritas wilayah, dan pemanfaatan sumber daya alam di sana. Daerah perbatasan seringkali memiliki populasi dengan tingkat ekonomi dan kesejahteraan rendah, yang dapat menciptakan potensi konflik dan mengganggu keamanan. Aktivitas ilegal seperti penyelundupan bahan bakar minyak dan barang-barang pokok sering terjadi karena perbedaan harga antara negara-negara berbatasan. Hal tersebut bisa memicu ketegangan diantara negara-negara dan berpotensi memicu konflik perbatasan. Kekurangan infrastruktur di wilayah perbatasan juga menghambat upaya pengamanan yang efektif, sehingga pembangunan infrastruktur menjadi hal yang penting untuk menjaga keamanan serta perkembangan wilayah perbatasan (Julqurniati & Susanty, 2019).

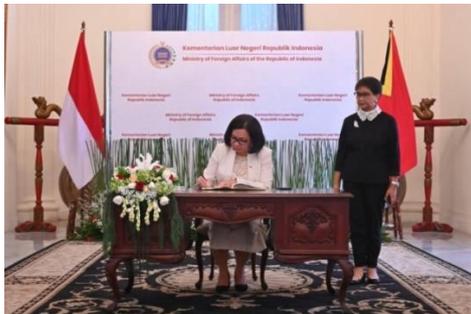
Henrikson menambahkan bahwa diplomasi perbatasan harus berkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah pinggiran untuk mengelola perbatasan negara. Pemerintah pusat maupun daerah dari kedua negara harus bisa menyesuaikan untuk mengelola perbatasan negara. Sehingga kepentingan pusat dan daerah dari masing-masing negara harus sejalan. Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia harus memperhatikan secara khusus provinsi NTT yang berbatasan dengan Timor Leste. Pemerintah pusat Timor Leste pun juga harus melakukan koordinasi yang baik dan sinkron dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan Indonesia (Daryono, 2017). Dalam membangun daerah di wilayah perbatasan, kedua negara telah melakukan kerjasama untuk meningkatkan infrastruktur. Indonesia adalah salah satu mitra kerjasama Timor Leste di bidang infrastruktur. Indonesia mempunyai pengaruh sangat penting dalam infrastruktur di Timor Leste. Kerjasama yang dilakukan diantara lain berupa pelatihan, program magang, pengiriman tenaga ahli dan pembangunan infrastruktur jembatan. Hal lainnya adalah seperti bertukar pengalaman dalam bidang jembatan, jalan, perumahan, perencanaan air minum sertajasa konstruksi.

#### 2) Kerjasama Internasional

Kerjasama kedua negara di wilayah perbatasan melibatkan sektor ekonomi, sosial, dan budaya untuk mengatasi permasalahan termasuk penyelundupan. Perantara di daerah perbatasan dipimpin oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai ketua

BLC (Border Liaison Committee). Tugas BLC mencakup pertukaran informasi, pertemuan antar BLC Indonesia dengan BLC Timor Leste, serta koordinasi aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya demi peningkatan kesejahteraan serta keamanan di perbatasan. BLC juga menangani permasalahan yang timbul selama pelaksanaan kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya (Mangku, 2018).

BLC Indonesia dengan Timor Leste mengambil tindakan penting untuk mengelola perbatasan. Mereka berupaya memaksimalkan kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan permohonan visa khusus dari Timor Leste, sementara Timor Leste mencatat usulan akses jalan transportasi di laut dari Maluku Tenggara Barat menuju Dili. BLC perlu meningkatkan peran mereka dalam menyelesaikan kasus batasan negara dan berkoordinasi dengan kabupaten di wilayah perbatasan serta melakukan sosialisasi mengenai konvensi garis batasan Indonesia-Timor Leste kepada penduduk setempat (Mangku, 2018).



Gambar 6: Timor Leste dan Menlu RI Bahas Kerjasama Perbatasan  
Sumber: Kemenlu 2023

Peran BLC dianggap sangat penting dalam mengelola wilayah perbatasan. Lembaga ini memiliki beberapa tujuan, termasuk pertukaran informasi tentang perkembangan kawasan perbatasan untuk kepentingan bersama serta peningkatan kerjasama dibidang ekonomi dan social budaya di perbatasan. Peran nyata yang dimainkan oleh BLC memiliki dampak yang signifikan karena memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk memahami situasi di lapangan dengan lebih baik. Pengelolaan perbatasan ini harus efektif dan berdampak positif pada masyarakat di kawasan perbatasan, mencakup sektor-sektor seperti ekonomi, sosial, keamanan, dan pendidikan. Untuk memaksimalkan kerjasama ini, pemerintah seharusnya memberikan tambahan anggaran yang memadai untuk mendukung BLC dalam menjalankan perannya yang krusial (KBRI, 2023).

Indonesia dengan Timor Leste menjalin kerjasama yang signifikan di wilayah perbatasan, terutama dalam aspek keamanan dan pertahanan yang melibatkan kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia dan Polici Nacional de Timor Leste (PNTL) berkolaborasi melalui pelatihan bersama untuk mengatasi berbagai masalah lintas batas, termasuk illegal entry, perdagangan ilegal, penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, serta ancaman terorisme. Fokusnya adalah pada pencegahan dan

penanggulangan tindakan kriminal di wilayah perbatasan. Upaya ini termasuk penyelenggaraan forum diskusi (FGD) yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak terkait dan mengembangkan strategi pencegahan. Dukungan dari Atase Kepolisian Negara Timor Leste, Armano Montero, menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik untuk mencegah serta menangani kejahatan lintas batas di wilayah perbatasan (Ernes, 2023).



Gambar 7: Kepolisian Indonesia dan Timor Leste bahas penanggulangan Transnational Crime  
Sumber: Kemenlu 2023

Timor Leste National Police (PNTL) dan Polisi Nasional Indonesia (Polri) telah berhasil mengatasi masalah kejahatan lintas batas dengan baik. Atase PNTL untuk Jakarta, Armando Monteiro, menyatakan bahwa kedua negara telah menjalankan koordinasi komunikasi yang efektif dalam tingkat operasional dan taktis. Ini terlihat dalam kerja sama antara kantor polisi di tiga resor polisi (Polres) berbatasan dengan Republik Indonesia, seperti Polres Telu dan Polisi Daerah Maliana, Polres Ovalima dengan kantor polisi Malaka, dan Polres Okusi dengan Polisi Timor Tengah Utara. Kerjasama antara PNTL dan Polri didasarkan pada dua nota kesepahaman (MoU) yang berkaitan dengan penanganan dan pencegahan kejahatan lintas batas, termasuk penanganan kejahatan narkoba dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Selama pelaksanaan MoU ini, Polri dan PNTL telah mengadakan berbagai kegiatan di tingkat regional dan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam mengatasi tantangan keamanan lintas batas (Eka, 2022)

Pemerintah Indonesia dengan Timor Leste menjalin kerjasama dalam mengatasi permasalahan di wilayah perbatasan dengan menerapkan kebijakan lintas batas. PLB berfungsi sebagai paspor dan visa bagi penduduk tetap di wilayah perbatasan, dengan masa berlaku 1 tahun dan tinggal selama 10 hari (perpanjangan hingga 30 hari) di Timor Leste. PLB mencakup daerah-daerah yang disepakati oleh kedua negara dan memudahkan kunjungan, perdagangan tradisional, dan kegiatan adat di wilayah perbatasan (KBRI, 2023).

Proses pengajuan dan penerbitan Pas Lintas Batas (PLB) dilakukan oleh Kantor Imigrasi setempat di sembilan titik perlintasan yang telah ditentukan, dengan tujuan mengurangi aktivitas ilegal di wilayah perbatasan. Beberapa distrik yang dapat dilintasi dengan PLB mencakup Distrik Covalima di Timor Leste, termasuk Sub Distrik Suai Kota, Futululik, Tilomar, dan Fatumean,

Distrik Oecussi di Timor Leste, termasuk Sub Distrik Nitibe, Oesilo, Passabe, dan Pante Makassar, serta Distrik Bobonaro di Timor Leste, termasuk Sub Distrik Balibo, Lolotoi, dan Malian. PLB menjadi solusi untuk masyarakat yang menempati daerah perbatasan guna melakukan perdagangan dan sosial secara legal serta mengurangi aktivitas ilegal di kawasan perbatasan (Lewokeda, 2022)



Gambar 11: Penyerahan Pas Lintas Batas kepada warga perbatasan RI-Timor Leste  
Sumber: Antaranews.com

Penerbitan Pas Lintas Batas (PLB) oleh Kantor Imigrasi di sembilan titik perlintasan di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste bertujuan mengurangi aktivitas ilegal. PLB memungkinkan masyarakat di beberapa distrik Timor Tengah Utara, Kupang, Alor, dan Pantar untuk melakukan perjalanan ke tiga distrik di Timor Leste secara legal. Distrik-distrik tersebut mencakup Covalima, Oecussi, dan Bobonaro. Inisiatif ini membantu memfasilitasi kegiatan perdagangan dan sosial yang sah di wilayah perbatasan sambil mengurangi aktivitas ilegal (Paulus et al., 2021).

Timor Leste resmi menjadi anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2022 di Kamboja. Ini mengakibatkan pembebasan visa kunjungan bagi warga negara Timor Leste oleh pemerintah Indonesia. Surat Edaran IMI-0058.01.01 Tahun 2023 dari Direktur Jenderal Imigrasi menetapkan pembebasan visa kunjungan selama 30 hari untuk keperluan kunjungan wisata, pembelian barang, rapat, dinas pemerintahan, dan bisnis di Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan di daerah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) antara lain Mota'ain, PMotamasin, dan Wini. Pembebasan visa ini diharapkan akan memfasilitasi kunjungan masyarakat Timor Leste ke Indonesia, mendukung perekonomian di wilayah perbatasan, dan mengurangi upaya ilegal entry. Data kuantitatif tidak tersedia dalam teks yang diberikan (Saba, 2023).

Faktor penentuan pembangunan PLBN melibatkan jumlah penduduk di daerah perbatasan, jalur lintas batas, potensi ekonomi, jalur lalu lintas, dan wilayah non-khusus. Aspek pengelolaan lintas batas mencakup sarana, pelayanan, keamanan, sosial budaya, dan ekonomi. Pembangunan PLBN yang terintegrasi dan modern diharapkan meningkatkan mobilitas barang dan jasa, membuka akses ke daerah terisolir, dan memperkuat konektivitas antar daerah. PLBN juga mencerminkan kehadiran negara di perbatasan, membantu mengelola

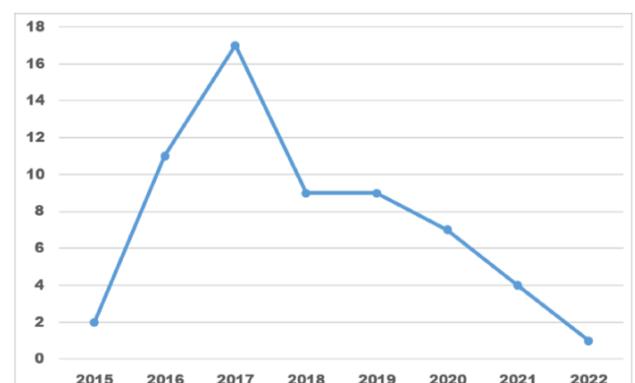
keamanan, dan mencegah aktivitas ilegal (Hutabarat, 2022).

Pengelolaan perbatasan dari perspektif kepabeanan melibatkan penarikan bea keluar masuk serta cukai untuk melindungi masyarakat dari barang berbahaya luar negeri. Bea Cukai juga mendukung perdagangan dan melindungi industri dalam negeri. Tantangan utama melibatkan penyelundupan narkoba, obat-obatan terlarang, dan kejahatan transnasional. Langkah-langkah mitigasi mencakup sinergi dengan instansi terkait, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemantauan data lintas batas melalui aplikasi, koordinasi pembangunan infrastruktur PLBN, serta sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, serta kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait (Hutabarat, 2022).

Fungsi keimigrasian di perbatasan mencakup pemeriksaan dokumen, penempatan cap pada surat perjalanan, dan menjaga daerah perbatasan. Petugas imigrasi bertugas memeriksa surat perjalanan warga negara Indonesia serta asing untuk masuk atau keluar dari Indonesia. Mereka juga memberikan cap di dokumen tersebut sebagai bukti izin masuk dan keluar dari Indonesia. Selain itu, petugas imigrasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga daerah perbatasan Indonesia guna mencegah penyeberangan pelanggaran hukum yang telah berlaku di Indonesia.

### b. Dampak Upaya Kedua Pemerintah terhadap Kasus Penyelundupan

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui TNI dan Polri bekerja sama dengan aparat keamanan Timor Leste dalam mengurangi tindakan penyelundupan telah dilakukan. Aparat keamanan dari Indonesia maupun Timor Leste telah banyak menggagalkan percobaan penyelundupan barang-barang maupun *illegal entry* yang dilakukan dari Indonesia ke Timor Leste maupun sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa upaya tersebut berjalan sesuai harapan agar tindakan penyelundupan di wilayah perbatasan dapat diminimalisir (Kaha, 2021). Adapun Penurunan Penyelundupan Garmen Bea Cukai Atambua bisa dilihat dalam graphic berikut ini



Gambar : Grafik Penurunan Penyelundupan Garmen Bea Cukai Atambua  
Sumber: IJRSM 2023

Grafik tersebut menggambarkan penanganan penyelundupan pakaian bekas oleh Petugas Bea Cukai Atambua selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, terdapat dua kasus penyelundupan pakaian bekas pada bulan Mei dan Desember. Jumlah kasus berhasil meningkat pada tahun 2016, dengan 11 kasus berhasil digagalkan. Kemudian, pada tahun 2017, Bea Cukai Atambua menangani sebanyak 17 kasus. Namun, pada tahun 2018, terjadi penurunan menjadi sembilan kasus penyelundupan. Penurunan jumlah kasus penyelundupan juga terjadi pada tahun 2019, dengan sembilan kasus yang berhasil digagalkan. Pada tahun 2020, terjadi penurunan lagi menjadi tujuh kasus. Tren penurunan berlanjut hingga tahun 2021, di mana hanya empat kasus yang diatasi oleh Bea Cukai Atambua, masing-masing pada bulan Mei, September, November, dan Desember. Pada tahun 2022, hanya satu kasus yang ditemukan pada bulan Maret (Stefani Djong & Damayanti, 2023).

PLBN Mota'ain merupakan daerah perbatasan resmi yang menjadi fokus Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan perekonomian di wilayah perbatasan. Salah satu tujuannya adalah memfasilitasi aktivitas lintas negara, khususnya perdagangan lintas batas, yang sebelumnya sering menggunakan jalur tidak resmi atau "jalur tikus." Sebelum adanya PLBN Mota'ain, lebih dari 20 jalur tidak resmi digunakan oleh masyarakat untuk menyelundupkan berbagai barang, seperti bahan bakar minyak, karena kurangnya pengawasan oleh pihak berwenang. Dengan adanya PLBN, diharapkan aktivitas lintas negara dapat lebih terkendali dan legal (Nahak et al., 2021).



Gambar 14: PLBN Mota'ain.  
Sumber: detik.com

Pembangunan PLBN Mota'ain telah memberikan dampak positif terhadap aktivitas perekonomian dan keimigrasian di wilayah perbatasan. Biaya perdagangan barang menjadi lebih terjangkau dengan penerapan SOP yang ketat dan pasti untuk penyeberangan melalui PLBN. Penambahan usaha ekonomi baru di sekitar perbatasan, seperti toko dan warung, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan per kapita. Pembangunan PLBN juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan (Damarjati, Danu, 2017). Selain itu, PLBN Mota'ain mengurangi kasus penyelundupan barang dan illegal entry karena memfasilitasi perdagangan dan perlintasan secara resmi antar kedua negara. Meskipun masih ada

beberapa kasus penyelundupan yang terungkap, PLBN Mota'ain telah berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan dan mengurangi kesenjangan ekonomi Indonesia dengan Timor Leste yang memicu tindakan penyelundupan di daerah perbatasan kedua negara. Masyarakat yang melintasi wilayah kedua negara juga lebih terpantau, mengurangi kasus penyelundupan orang atau illegal entry (B. Lay & Wahyono, 2018).

PLBN Wini adalah salah satu pos perbatasan yang menghubungkan kedua negara di Kabupaten Timor Tengah Utara yang bertujuan bertujuan untuk mengurangi jalur-jalur tikus di wilayah perbatasan dan mengurangi kasus illegal entry serta penyelundupan. Fasilitas ini memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dokumen dan barang yang dibawa oleh pelintas batas, termasuk barang-barang terlarang dan bea cukai. PLBN Wini memudahkan masyarakat dalam melakukan perlintasan antar negara karena bersifat terpadu, melibatkan unsur imigrasi, bea dan cukai, serta karantina kesehatan. Selain itu, pembukaan PLBN Wini merupakan upaya pemerintah untuk mengamankan wilayah perbatasan dan mengurangi tindakan penyelundupan yang dapat merugikan Negara (Atambua, 2023).

PLBN Wini juga memiliki tugas terkait mobilitas warga di daerah perbatasan, seperti melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian bagi pelintas batas dan pemeriksaan kendaraan kargo. Dokumen dan persyaratan kesehatan juga diperlukan untuk barang-barang tertentu, dan petugas berwenang untuk menyita atau memusnahkan barang yang tidak memenuhi syarat. Dengan adanya PLBN Wini, diharapkan perlintasan batas antara kedua negara dapat berlangsung dengan lebih teratur, legal, dan aman bagi kedua negara.



Gambar 16: Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini.  
Sumber Kantor Imigrasi Kelas II Atambua

Pada pertemuan antara PLBN Wini Indonesia dan Pos Sakato Timor Leste pada 31 Maret 2022, beberapa kesepakatan penting dicapai. Kedua pos perlintasan akan dibuka kembali dengan tetap mematuhi aturan dan protokol kesehatan. WNI yang menuju wilayah Oecussi, Timor Leste, harus memiliki sertifikat vaksinasi kedua atau menjalani karantina 14 hari. Warga Timor Leste yang melintasi wilayah Indonesia perlu sertifikat vaksinasi dan hasil tes PCR. PLBN Wini memberikan layanan perlintasan setiap hari dengan waktu operasional tertentu, dan pelintas batas dengan Pas Lintas Batas (PLB) tidak diizinkan masuk ke Timor Leste sesuai

peraturan terbaru. Kegiatan perlintasan barang dari Timor Leste ke Indonesia dapat dilakukan setiap hari dengan pembatasan pengemudi kendaraan (Humas, 2018).

Sebelum pembangunan PLBN Motamasin, minuman beralkohol impor dengan harga murah dan bahan bakar minyak kerap tersedia secara ilegal di Malaka, Nusa Tenggara Timur, melalui jalur tikus dari Timor Leste. Namun, dengan adanya PLBN Motamasin dan patroli rutin oleh aparat keamanan, upaya penyelundupan tersebut berhasil ditekan. Letnan Satu TNI Jona Fajar menyatakan bahwa meskipun kasus penyelundupan berkurang, patroli terus dilakukan untuk mengawasi jalur-jalur potensial yang dapat digunakan sebagai jalur tikus. PLBN Motamasin, berfungsi sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Kabupaten Malaka dengan wilayah Covalina, Timor Leste, serta menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi tindakan ilegal melintasi perbatasan dan penyelundupan, menjadikannya wajah terdepan Indonesia (Zafna, 2020).



Gambar 18: PLBN Motamasin.  
Sumber detik.com

Masyarakat di sekitar wilayah perbatasan Motamasin, Kabupaten Malaka, memiliki suku dan keturunan yang sama dengan masyarakat RDTL (Republik Demokratik Timor Leste). Mata pencaharian mayoritas adalah nelayan tradisional, peternak, dan bertani secara tradisional, yang mengakibatkan taraf hidup yang rendah. Perbedaan harga antara kedua wilayah ini menciptakan perdagangan ilegal yang menguntungkan masyarakat di perbatasan Motamasin, termasuk barang-barang seperti lemari pakaian, kacamata, ban bekas, beras, kopi, bensin, dan kendaraan roda dua. Kabupaten Malaka telah berusaha untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan yang berlaku meskipun beberapa tindakan ilegal masih terjadi meski dalam penurunan. Pemerintah juga berupaya memberikan kesempatan kerja yang layak dan mendukung ekonomi masyarakat melalui pembangunan di wilayah perbatasan Motamasin (Costa, 2022).

Selain itu, PLBN Motamasin membuka pasar sebagai fasilitas yang mendukung ekonomi masyarakat di sekitarnya. Pasar ini diharapkan menjadi tempat aktivitas ekonomi antar negara yang legal, memungkinkan masyarakat Timor Leste untuk berbelanja di Indonesia dengan visa atau Pas Lintas Batas (PLB). Meskipun pasar sempat terhenti selama pandemi COVID-19, kini telah dibuka kembali dan

menjadi sumber aktivitas ekonomi yang ramai setelah pandemi mereda. pemerintah juga membangun tiga PLBN lainnya, yaitu PLBN Napan yang sudah selesai dan menunggu peresmian, serta PLBN Oepuli dan PLBN Maritaing yang masih dalam proses pembangunan. Pembangunan PLBN ini bertujuan untuk membuka keterisolasian masyarakat dan mengurangi kasus illegal entry serta penyelundupan di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste (Costa, 2022)

### 3. Kesimpulan

Artikel di atas menjelaskan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk mengatasi penyelundupan yang ada di wilayah kedua negara termasuk diplomasi perbatasan, kerjasama internasional, pengelolaan perbatasan, dan penanggulangan penyelundupan di daerah perbatasan. Upaya mengurangi penyelundupan di daerah perbatasan telah melibatkan berbagai elemen pemerintahan antara lain kepemimpinan tingkat tinggi yaitu Presiden Joko Widodo dari Indonesia dan Perdana Menteri Timor Leste, instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah yaitu Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Daerah di NTT, Aparat Keamanan yang melibatkan TNI, POLRI, dan PLBN, serta lembaga terkait yaitu Bea Cukai, Kantor Imigrasi, dan *Asian Development Bank*. Kerjasama lintas sektor yang dilakukan kedua negara tersebut mencerminkan komitmen untuk meningkatkan keamanan perbatasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan kesejahteraan masyarakat yang ada di perbatasan. Oleh karena itu, kolaborasi yang dilakukan elemen-elemen pemerintah dari kedua negara menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga stabilitas serta keamanan di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- DPR RI.(2008). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Jakarta: DPR RI.
- Huberman. A. Michael, Mathew B. Miles. (1992) Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kemhan\_RI. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015.

#### Jurnal

- Axelrod, R., & Keohane, R. O. (2018). Achieving Cooperation Under Anarchy: Cooperation under Anarchy, 38(1), 226–254. <https://doi.org/10.2307/j.ctv39x84c.12>

- B. Lay, J. R. B., & Wahyono, H. (2018). Dampak Pengembangan PLBN Motaain Kawasan Perbatasan RI-RDTL Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur. *J. Pembangunan Wilayah & Kota*, Vol.14(1), p.29.
- Henrikson, A. K. (2000). Facing Across Borders: The Diplomacy of Bon Voisinage. *International Political Science Review*, 21(2), 121–147. doi:10.1177/0192512100212002
- Hidayat, M. N. (2015). Evolusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia Di Kalimantan Utara. *Jurnal Paradigma*, 4(2), 92–103. <https://ejournals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/410>
- Hutabarat, L. F. (2022). Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. *Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri*, 7(8), 9.
- Julqurniati, N., & Susanty, D. I. (2019). Potensi Konflik di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia-Republik Demokratik Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur ). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 8(1), 58–78.
- Mangku, D. G. S. (2018). Implementasi Joint Border Committee (Jbc) Untuk Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Antara Indonesia-Timor Leste. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 43. <https://doi.org/10.35586/v5i1.316>
- Mansyah, A. (2017). Nasionalisme Masyarakat Indonesia Di Perbatasan Dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Negara (Studi Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat). *Jurnal Prodi Peperangan Asimetris*, 3(3), 17–40.
- Nashiruddin, M. A. M. (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan. *Ummul Quro*, 4(Jurnal Ummul Qura Vol IV, No. 2, Agustus 2014), 33–42. <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>
- Nino, H. (2018). Konflik Sosial Di Perbatasan Indonesia Dan Republik Demokrat Timor Leste (Studi Kasus Tapal Batas Di Kabupaten Timor Tengah Utara Dan Distrik Oecusse). 2(2), 92–100. <https://doi.org/10.21776/ub.sosiologi.jkrbs.2018.002.2.07>
- Paulus, Y., Andries, R., & Anwar, A. (2021). Urgensi Penetapan Pas Lintas Batas Antara Pulau Atauro ( Timor Leste ) Dan Pulau Lirang ( Indonesia ) Dari Perspektif Hukum Keimigrasian Amfoang Utara ( Kabupaten Kupang ); Alor Timur , Pantar dan Alor Barat Daya ( Kabupaten Mengisi formulir dan kemudian dilegalisir oleh Kepala Desa setempat. 1(10), 994–1001.
- Permatasari, Y. P. (2022). Motif Prioritas Kebijakan Pertahanan Era Jokowi Dalam Mempertahankan Kedaulatan Nkri Tahun 2014-2020. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(2). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2103>
- Rachmawati, I., & Dewi, M. A. (2020). A Note for Indonesia's Border Diplomacy in Tanjung Datu, West Kalimantan. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.18196/hi.91158>
- Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rahman Mulyawan. (2022). Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pertahanan Di Wilayah Perbatasan Antarneegara Dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi. *Jurnal Konseling Komprehensif*, 1(1), 1–6.
- Ramin, R. (2016). Konsep Desain Pembuatan Satelit Pertahanan Guna Menjaga Wilayah Kedaulatan Indonesia. *Jurnal Inovasi Pertahanan*, 2(1), 31–40. [www.balitbang.kemhan.go.id](http://www.balitbang.kemhan.go.id)
- Salsabilla Denura, J., & Puspita Sari, V. (2021). Diplomasi Ekonomi Indonesia ke Bangladesh: Studi Kasus Ekspor Gerbong Kereta. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), 212–227. <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.31172.33468>
- Stefani Djong, S., & Damayanti, A. (2023). The Roles of Atambua Customs and Challenges in Dealing with Garment Smuggling in Indonesia-Timor Leste Border Area. *International Journal of Scientific Research and Management*, 11(01), 1343–1357. <https://doi.org/10.18535/ijstrm/v11i01.sh02>

#### Website

- Atambua, K. I. K. I. T. (2023). Tempat Pemeriksaan Imigrasi TPI Wini. *Kanimatambu.Kemenkumham*. retrieved March 23, 2023, from <https://kanimatambua.kemenkumham.go.id/pages/pi-wini>

- Costa, D. (2022). Pasar PLBN Motamasin RI-RDTL Hari Ini Resmi Beroperasi, Pengunjung Dari Tiles Wajib Penuhi Ini. *VxTimor.Com*. Retrieved March 23, 2023, from <https://voxtimor.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-2274728929/pasar-plbn-motamasin-ri-rdtl-hari-ini-resmi-beroperasi-pengunjung-dari-tiles-wajib-penuhi-ini>
- Damarjati, Danu. (2017). Perbandingan Sekilas PLBN Motaain dengan Pos Perbatasan Timor Leste. Retrieved March 28, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-3467641/perbandingan-sekilas-plbn-motaain-dengan-pos-perbatasan-timor-leste>
- Daryono, A. (2017). BUMN Indonesia Rajai Pembangunan di Timor Leste. Retrieved March 23, 2023, from <https://mediaindonesia.com/ekonomi/123238/bumn-indonesia-rajai-pembangunan-di-timor-leste>
- Davis, R. (2019). *ADB, Indonesia, and Timor-Leste Sign Agreement on Cross-Border Trade and Cooperation*. Asian Development Bank. Retrieved May 26, 2023, from <https://www.adb.org/news/adb-indonesia-and-timor-leste-sign-agreement-cross-border-trade-and-cooperation>
- Eka. (2022). Tindak Kejahatan Lintas Batas, PNTL: Koordinasi dengan Indonesia Sangat Baik. Retrieved May 2, 2023, from <http://kabar6.com/tindak-kejahatan-lintas-batas-pntl-koordinasi-dengan-indonesia-sangat-baik/>
- Ernes, Y. (2023). *Polisi Se-ASEAN Pererat Kerja Sama Cegah Transnational Crime di Perbatasan*. Retrieved March 23, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-6373481/polisi-se-asean-pererat-kerja-sama-cegah-transnational-crime-di-perbatasan>
- Humas. (2018). Resmikan PLBN Wini dan Motamasin, Presiden: Sekarang Mereka 'Selfie' di Tempat Kita. Retrieved January 23, 2023, from <https://setkab.go.id/resmikan-plbn-wini-dan-motamasin-presiden-sekarang-mereka-selfie-di-tempat-kita/>
- Jr, M. (2023). Indonesia dan Timor-Leste Bahas Sejumlah Upaya Peningkatan Kerja Sama Bilateral. Retrieved March 23, 2023, from <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/indonesia-dan-timor-leste-bahas-sejumlah-upaya-peningkatan-kerja-sama-bilateral/>
- Kaha, K. (2021). Satgas Pamtas gagalkan penyelundupan Kayu Cendana dari Timor Leste. Retrieved May 21, 2023, from <https://www.antaraneews.com/berita/2400825/satgas-pamta-gagalkan-penyelundupan-kayu-cendana-dari-timor-leste>
- KBRI. (2023). *PAS LINTAS BATAS (PLB)*. Retrieved March 23, 2023, from [https://www.kemlu.go.id/dili/id/pages/kekonsuleran-pas\\_lintas\\_batas\\_/1762/etc-menu](https://www.kemlu.go.id/dili/id/pages/kekonsuleran-pas_lintas_batas_/1762/etc-menu)
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). Menlu RI dan Menlu Timor Leste Bertemu Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Perbatasan. Retrieved April 28, 2023, from <https://kemlu.go.id/portal/id/read/4363/berita/menlu-ri-dan-menlu-timor-leste-bertemu-bahas-kerja-sama-ekonomi-dan-perbatasan>
- Lewokeda. (2022). Imigrasi hadirkan layanan PLB di pos perbatasan tradisional RI-Timor Leste. Retrieved March 23, 2023, from <https://kupang.antaraneews.com/berita/97181/imigrasi-hadirkan-layanan-plb-di-pos-perbatasan-tradisional-ri-timor-leste>
- Payong, D. S. (2022). Pasukan Yonif 743/PSY Gagalkan Penyelundupan Mobil Mewah di Perbatasan RI dengan Timor Leste. Retrieved May 28, 2023, from <https://daerah.sindonews.com/read/703983/174/pasukan-yonif-743psy-gagalkan-penyelundupan-mobil-mewah-di-perbatasan-ri-dengan-timor-leste-1646478231>
- Pradipta. (2023). Indonesia-Timor Leste Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Perbatasan. Retrieved March 27, 2023, from <https://www.rri.co.id/dki-jakarta/internasional/162463/indonesia-timor-leste-perkuat-kerja-sama-pengelolaan-perbatasan>
- Saba. (2023). Pemerintah Indonesia Berikan Bebas Visa Kunjungan untuk WN Timor Leste. Retrieved March 29, 2023, from [https://www.rri.co.id/daerah/164797/pemerintah-indonesia-berikan-bebas-visa-kunjungan-untuk-wn-timor-leste?utm\\_source=news\\_main&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=GeneralCampaign](https://www.rri.co.id/daerah/164797/pemerintah-indonesia-berikan-bebas-visa-kunjungan-untuk-wn-timor-leste?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=GeneralCampaign)
- Zafna. (2020). Megahnya PLBN Motamasin. Retrieved May 14, 2023, from <https://travel.detik.com/fototravel/d-5302193/megahnya-plbn-motamasin>